

## IMPLEMENTASI PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK DI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:

**MELVINA<sup>1\*</sup>**

NIM. E1012161041

Joko Triyono,<sup>2</sup>, Dra. Kartika Ningtias,<sup>2</sup>

\*Email: [e1012161041@student.untan.ac.id](mailto:e1012161041@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Prograam Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Penyediaan Informasi Publik pada Bagian Dokumentasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis eksploratif. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2014,149) yaitu: 1) Komunikasi, kesimpulannya adalah pelaksanaan pemberian informasi publik terhadap masyarakat sudah diberikan atau disampaikan dengan baik 2) Sumber Daya, kesimpulannya adalah pegawai di Biro Humas dan Protokol khususnya pada bagian dokumentasi masih sangat kurang dan banyak yang pensiun., penyampaian informasi publik terhadap pegawai maupun masyarakat sudah berjalan dengan baik, sarana dan prasarana yang masih kurang. 3) Disposisi, kesimpulannya adalah pelaksanaan penyediaan informasi publik sudah baik, tidak ada insentif di biro humas dan protokol menunjukkan bahwa Kurangnya sumber pendorong dalam melaksanakan Implementasi tersebut seperti Insentif yaitu berupa pemberian honor kerja yang memadai kepada pegawai di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat dan 4) Struktur Birokrasi, kesimpulannya adalah Protokol standar operasional prosedur dalam penyediaan informasi publik di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat sudah berjalan dengan baik. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan informasi Daerah melalui peningkatan kemampuan SDM, peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Tersedianya regulasi pedoman pelaksanaan (SOP) dan peningkatan koordinasi dengan PPID Pembantu dan Kabupaten / Kota.

**Kata Kunci :** Implementasi, Penyediaan Informasi Publik.

**IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION PROVISION AT THE  
BUREAU OF PUBLIC RELATIONS AND PROTOCOL OF REGIONAL  
SECRETARIAT OF WEST KALIMANTAN PROVINCE**

By:

**MELVINA<sup>1\*</sup>**

NIM. E1012161041

H. JokoTriyono, SE, M.Si<sup>2</sup>, Dra. KartikaNingtias, M.Si<sup>2</sup>

\*Email: [e1012161041@student.untan.ac.id](mailto:e1012161041@student.untan.ac.id)

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak

**ABSTRACT**

This research aimed to describe and analyze the factors that caused the implementation of public information provision in the Documentation Section at the Bureau of Public Relations and Protocol of Regional Secretariat of West Kalimantan Province. The method used in this research was qualitative with exploratory analysis research design. This research used the theory of George C. Edward III (in Agustino, 2014,149), namely: 1) Communication, it was concluded that the implementation of public information provision to the public had been given or delivered properly 2) Resources, it was concluded that employees in the Bureau of Public Relations and Protocol, especially in the documentation section, were still very lacking and many were retiring. The delivery of public information to employees and the public had gone well, but facilities and infrastructure were still lacking. 3) Disposition, the conclusion was that the implementation of public information provision was decent, there were no incentives in the Bureau of Public Relations and Protocol, indicating the lack of a source of encouragement in carrying out the implementation such as incentives in the form of adequate work fees to employees at the Bureau of Public Relations and Protocol of Regional Secretariat of West Kalimantan Province and 4) Bureaucratic Structure, the conclusion was that the standard operating procedure protocol in public information provision at the Bureau of Public Relations and Protocol of the Regional Secretariat of West Kalimantan Province had been running well. It was suggested by the researcher that the ability in managing regional information should be improved by increasing the capacity of human resources and increasing supporting facilities and infrastructure. In addition, the SOP guidelines should be available and the coordination with PPID Assistant and regency/city should be increased.

**Keywords:** Implementation, Public Information Provision.



## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Undang - undang No. 14 Tahun 2008, di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 421/ HUMPRO/ 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana direvisi dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 163/ HUMPRO/ 2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya untuk pelaksanaan di Biro Humas dan Protokol dikeluarkan Keputusan Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 06 / HUMPRO / 2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga

Negara untuk memperoleh akses informasi publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik.

Dalam meningkatkan peranannya mempublikasikan kebijakan Pemerintah Daerah tersebut, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalbar sesuai dengan tupoksinya melaksanakan peliputan dan pemberitaan terhadap kegiatan Kepemerintahan dan kegiatan-kegiatan Pimpinan dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah sehingga seluruh Informasi tersebut dapat di akses oleh seluruh masyarakat Kalbar. Kegiatan Kepemerintahan dan Pimpinan maupun kebijakan-kebijakan yang dihasilkan selanjutnya akan didokumentasikan.

Namun sumber-sumber berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang masih terjadi petugas yang memiliki pengetahuan di bidang Humas yang harus menjalani beban kerja rangkap, selain harus

mengerjakan tugas fungsional sebagai penyedia layanan dan diseminasi informasi publik juga harus mengerjakan tugas administrasi dan tugas-tugas lainnya. Selain itu pegawai dibidang kerajinan saat ini belum ada sehingga setiap bidang kerja melakukan pengarsipan secara sendiri-sendiri, dan Sarana Prasarana yang ada belum tercukupi Sarana seperti peralatan dan perlengkapan kerja yaitu Kamera, Vidio Shooting dan ada beberapa yang rusak serta ketinggalan zaman, begitu juga dengan Printer, komputer, dan Radio HF/FM. Kemudian Prasarana, yang dibutuhkan ruang layanan informasi yang representative, dimana saat ini ruangan layanan dan untuk kegiatan peliputan, kemudian kegiatan kehumasan dan keprotokolan belum didukung dengan alokasi anggaran yang memadai sedangkan intensitas kegiatan Pemerintah Provinsi Kalbar dan para pimpinan cukup tinggi namun kegiatan kehumasan pendamping pemimpin terutama dalam Peliputan/ pemberitaan, pendokumentasian serta kegiatan

keprotokolan harus tetap berjalan. Disamping itu juga dalam hal Penyediaan Informasi dalam kerangka Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, dan sarana dan prasarana yang memadai.

## **2. Identifikasi Penelitian**

1. Ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang masih terjadi petugas yang memiliki pengetahuan di bidang Humas yang harus menjalani beban kerja rangkap, selain harus mengerjakan tugas fungsional sebagai penyedia layanan dan diseminasi informasi publik juga harus mengerjakan tugas administrasi dan tugas-tugas lainnya, Selain itu pegawai dibidang kerajinan saat ini belum ada sehingga setiap bidang kerja melakukan pengarsipan secara sendiri-sendiri.

2. Sarana Prasarana yang ada belum tercukupi Sarana seperti peralatan dan perlengkapan kerja yaitu Kamera, Vidio Shooting dan ada beberapa yang rusak serta ketinggalan zaman, Kemudian Prasarana, yang dibutuhkan ruang layanan informasi yang representative, dimana saat ini ruangan layanan dan untuk kegiatan peliputan

3. kegiatan kehumasan dan keprotokolan belum didukung dengan alokasi anggaran yang memadai sedang kanintensitas kegiatan Pemerintah Provinsi Kalbar dan para pimpinan cukup tinggi namun kegiatan kehumasan pendamping pemimpin terutama dalam Peliputan/pemberitaan.

## **3. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan pada Faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi dalam Penyediaan informasi Publik

pada Bagian Dokumentasi di Biro Humas dan Protokol yang belum optimal.

#### **4. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang telah berhasil penulis lakukan adalah: Mengapa Implementasi Penyediaan Informasi Publik pada bagian Dokumentasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum optimal?

#### **5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari dilaksanakannya penulisan ini yaitu; mendeskripsikan dan Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Penyediaan Informasi Publik pada Bagian Dokumentasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum optimal.

#### **6. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah program studi Ilmu Administrasi Publik Khususnya Kajian Kebijakan Publik mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Penyediaan Informasi Publik pada

bagian Dokumentasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Bagian Dokumentasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat khususnya pada Bagian Dokumentasi Penyediaan Informasi Publik.

### **B. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Definisi Konsep**

##### **1) Kebijakan Publik**

Anderson (dalam Agustino, 2012:7) memberikan pengertian kebijakan publik, sebagai “rangkaiian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan” konsep kebijakan ini menitik beratkan kepada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu

keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Menurut Dye (dalam Subarsono, 2016:2), kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan “(*public policy is whatever governments choose to do or not to do*)”. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan atau program-program yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah sebagai *policy maker* adalah bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, tentunya dalam penyusunannya melalui proses serta berbagai tahap. Tahapan-tahapan kebijakan menurut Winarno (2007:32) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda
2. Tahap Formulasi Kebijakan
3. Tahap Adopsi Kebijakan
4. Tahap Implementasi Kebijakan
5. Tahap Evaluasi Kebijakan

## 2. Teori

### 1) Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik

adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah olah tahapan ini kurang berpengaruh.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:149), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai: tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Donal Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Nugroho, 2015:219) mengembangkan model implementasi kebijakan klasik. Model ini mengamsumsikan bahwa:

*“implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa variabel kritis implementasi kebijakan adalah sumber daya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegakan aktivitas, karekteristik badan-badan*

*yang mengimplementasikan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan konsisi politik, yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan”.*

Abdul Wahab (dalam Tahir 2014:55) mengatakan bahwa: implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan lazimnya, keputusan tersebut.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:196) menjelaskan. Bahwa Implementasi kebijakan adalah:

*“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.*

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:196) mengatakan bahwa: “Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang.

## 2) Model Implementasi Geogrgie C. Edward III

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Agustino, 2012:149-153) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### 1. Komunikasi

Menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).

Terdapat tiga dimensi komunikasi kebijakan dalam hal ini, yaitu 1). Dimensi transmisi (*transmission*). 2). Dimensi kejelasan

(*clarity*). 3). Dan Dimensi konsistensi (*consistency*).

## 2. Sumber Daya

Menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial..

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edward III, yaitu sebagai berikut:

1. Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Kewenangan. Artinya, kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan.
4. Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk

memperlancar proses komunikasi kebijakan.

## 3. Disposisi

Menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kejujuran.

Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dari aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan.
2. Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidak berpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
3. Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.
4. Struktur Birokrasi

Menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan..

### 3) Informasi Publik

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi (2013:2) mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Sementara menurut Assegaf dan Khatarina (2005) menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat bukanlah milik negara, namun milik masyarakat.

Menurut Hetifah Sj. Sumarto (2009:112) hak terhadap informasi adalah bagian yang esensial dalam mekanisme partisipator. Indonesia baru saja mengesahkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang menjamin akses perlu diperkuat oleh fasilitator partisipasi adalah bagaimana membuka akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan memberikan tantangan pada komunitas untuk terlibat pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kualitas governance. berbagai pengalaman advokasi governance menunjukkan pentingnya peran data dan informasi sebagai salah satu kunci kesuksesan.

### 3. Kerangka Pikir Penelitian

Didalam penelitian ini peneliti menganalisis menggunakan model implementasi George C. Edward III (dalam Agustino, 2014,149) yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi, dan memfokuskan pada Sumber daya yang terdiri dari Staf dan Fasilitas karena kondisi ini yang

bermasalah dilapangan. Output pada penelitian ini adalah terciptanya faktor-faktor yang mempengaruhi staf dan fasilitas di Bagian Dokumentasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat.

↓  
Output:  
Terciptanya Implementasi Penyediaan Informasi Publik Pada Bagian Dokumentasi Yang Belum Optimal

Tabel 2.2  
Kerangka Pikir Penelitian  
Implementasi Penyediaan Informasi Publik Pada Bagian Dokumentasi Di Biro Humas Dan Protokol Setda. Provinsi Kalimantan Barat

Identifikasi Masalah Penelitian:

1. Pelimpahan beban kerja rangkap, selain harus mengerjakan tugas fungsional sebagai penyedia layanan dan diseminasi informasi publik juga harus mengerjakan tugas administrasi dan tugas-tugas lainnya. Selain itu pegawai dibidang kersipan saat ini belum ada sehingga setiap bidang kerja melakukan pengarsipan secara sendiri-sendiri.
2. Peralatan dan perlengkapan kerja yang masih kurang seperti Kamera, Vidio Shooting dan ada beberapa yang rusak serta ketinggalan zaman begitu juga dengan Printer, komputer, dan radio HF/FM dan ruangan kerja yang kurang representative.
3. Kegiatan kehumasan dan keprotokolan belum didukung dengan alokasi anggaran yang memadai sedangkan intensitas kegiatan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Para Pemimpin cukup

Fokus Penelitian :

Faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi dalam Penyediaan informasi Publik pada Bagian Dokumentasi di Biro Humas dan Protokol belum optimal.

Faktor-faktor dalam pencapaian keberhasilan implementasi menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2014, 149) :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

### C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Denzin dan Lincoln 1987 dalam (Moleong:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang Implementasi Penyediaan Informasi Publik pada Bagian Dokumentasi Di Biro Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini akan disajikan dalam bentuk eksploratif, yaitu gambaran mengenai Implementasi Penyediaan Informasi Publik pada Bagian Dokumentasi Di Biro Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Kabbag Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar.
- b. Kasubbag Dokumentasi dan Audiovisual dan Staf di Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar.
- c. Kasubbag Penyaringan Informasi Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar.
- d. Kasubbag Tata Usaha Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Penyediaan Informasi Publik pada Bagian Dokumentasi Di Biro Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum berhasil dengan baik.

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Teknik Dokumentasi

Teknik keabsahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai Implementasi Penyediaan Informasi Publik Di Biro Humas Dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan adalah sebagai berikut:

##### **1. Faktor Komunikasi**

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan Penyediaan Informasi Publik dapat berjalan dengan baik.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*), yaitu:

### **1. Transmisi**

Berdasarkan hasil wawancara melalui Kasubbag Dokumentasi dan Audiovisual di Biro Humas dan Protokol dalam hal ini pelaksanaan pemberian informasi publik terhadap masyarakat sudah diberikan atau disampaikan dan pemberian informasi tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang berlaku di Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalbar. Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalbar berupaya memberikan informasi atau data-data sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Adanya miss komunikasi di Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalbar menyebabkan pelayanan di Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalbar menjadi kurang maksimal.

### **2. Kejelasan**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kabbag dan Kasubag Biro Humas dan Protokol terkait dengan Keterbukaan Informasi oleh Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar sudah di sampaikan dengan jelas kepada publik. Setiap informasi yang diperlukan, pemohon informasi harus mengisi formulir-

formulir yang telah disediakan terlebih dahulu. Dan selama ini setiap informasi yang diberikan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalbar belum menerima penolakan atau mengajukan keberatan dari pemohon informasi atau masyarakat. Informasi publik tersebut dapat diakses melalui media seperti media cetak, media elektronik, dan media sosial.

### **3. Konsistensi**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kabbag dan Kasubbag Biro Humas dan Protokol pelaksanaan informasi publik di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten adanya. Sebagaimana dijelaskan juga setiap Informasi yang diberikan kepada publik haruslah sesuai dengan apa yang publik inginkan. Adanya miss komunikasi dan faktor cuaca menjadikan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Biro Humas dan Protokol menjadi kurang maksimal.

## 2. Faktor Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (resource). Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat jelas dan konsisten. Namun jika para implementor kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan implementasi kebijakan mungkin akan menjadi tidak optimal.

### 1. Sumber Daya Manusia (Staff)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kabbag dan Kasubbag Biro Humas dan Protokol bahwa pegawai yang ada di Biro Humas dan Protokol khususnya pada bagian dokumentasi masih sangat kurang terlebih lagi banyak juga pegawai yang pensiun. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi penyediaan informasi publik di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalbar. Untuk itu kekurangan pegawai yang ada di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalbar harus segera di atasi dan harus sesuai dengan kompetensi sehingga kinerja pegawai dapat maksimal dalam penyampaian dan penyediaan informasi publik.

## 2. Informasi

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kabbag dan Kasubbag Biro Humas dan Protokol terkait penyampaian informasi publik terhadap pegawai maupun masyarakat sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana dijelaskan juga Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalbar memberikan informasi sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku. Hal ini berarti pegawai di Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar sudah bisa melaksanakan tugas dan fungsi mereka masing-masing.

### 3. Wewenang

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kabbag dan Kasubbag Biro Humas dan Protokol sudah ada pembagian tugas dan wewenang oleh para pelaksana dalam memudahkan pekerjaan pada Bagian Dokumentasi di Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar. Oleh karena itu kewenangan sangat diperlukan terutama dalam pengambilan keputusan yang dibutuhkan dengan kondisi di lapangan untuk menjamin kewenangan yang di laksanakan

sesuai dengan harapan. Sebagaimana dijelaskan juga kewenangan yang ada berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

#### **4. Fasilitas**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kabbag dan Kasubbag Biro Humas dan Protokol sarana dan prasarana yang ada di Biro Humas dan Protokol khususnya pada bagian dokumentasi belum memadai. Peralatan untuk kegiatan peliputan seperti kamera yang jumlahnya terbatas dan peralatan kantor lainnya yang sudah ketinggalan zaman. Anggaran yang terbatas apalagi dengan kondisi yang seperti ini dimana kebijakan pemerintah dalam rangka untuk menangani masalah pandemi covid-19 sehingga beberapa anggaran pun di alihkan.

#### **3. Faktor Disposisi**

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

#### **1. Sikap Pelaksana**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kabbag dan Kasubbag Biro Humas dan Protokol terkait dengan sikap pelaksana dalam pelaksanaan penyediaan informasi publik sudah baik, dari unsur seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan, dari arahan dan tanggapan pelaksanaan perekaman serta respons untuk pelaksanaan dalam menanggapi apa yang dilakukan di dalam pelaksanaan penyediaan informasi publik.

#### **2. Insentif**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kabbag dan Kasubbag Biro Humas dan Protokol terkait pemberian insentif atau bonus di Biro Humas dan Protokol tidak ada terkecuali insentif yang sifatnya khusus dari pemerintah.

#### **4. Faktor Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan dalam implementasi. Salah satu dari aspek struktur yang paling mendasar dari organisasi apapun adalah prosedur operasi pelayanan. Srandar operasional pelayanan (SOP)

memungkinkan para pejabat publik untuk membuat keputusan setiap hari.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap pertemuan sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan kelompok sasaran). Salah satu dari aspek struktur paling mendasar dari organisasi apapun yaitu prosedur operasi pelayanan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kabbag dan Kasubbag Biro Humas dan Protokol standar operasional prosedur dalam penyediaan informasi publik di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat membantu kinerja pegawai untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai implementasi penyediaan informasi publik di Biro Humas dan Protokol

Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut::

#### 1. Faktor Komunikasi yaitu:

Pemberian informasi publik di Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalbar kepada masyarakat sudah baik hanya saja belum optimal. Penyampaian Informasi yang berkenaan dengan publik sudah berjalan dengan baik. Faktor Sumber Daya yaitu:

Sumber daya manusia yang kurang harus segera diisi dan sesuai dengan kompetensi sehingga kinerja pegawai di Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalbar dapat optimal. Faktor Disposisi yaitu:

Sikap Pelaksana dalam pelaksanaan penyediaan informasi publik di Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalbar sudah baik. Sikap yang ditunjukkan para pelaksana yaitu pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan, dari arahan dan tanggapan pelaksanaan perekaman serta respons untuk pelaksanaan dalam menanggapi apa yang dilakukan di dalam pelaksanaan penyediaan informasi publik sudah baik.

Tidak ada pemberian insentif secara khusus oleh pemerintah terhadap pegawai di Biro Humas dan Protokol, Setda Prov. Kalbar. Tidak adanya pemberian insentif terhadap pegawai akan menyebabkan kinerja pegawai yang kurang optimal.

2. Faktor Struktur Birokrasi yaitu:

Adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan penyediaan informasi publik di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat membantu kinerja pegawai untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

**2. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Kantor Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat mengenai implementasi penyediaan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM Biro Humas dan Protokol Setda Prov.. Kalbar melalui pendidikan dan pelatihan dan mengoptimalkan SDM yang ada guna menunjang kelancaran

tugas-tugasnya maupun dalam pelayanan pimpinan.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang terbatas guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan penyediaan informasi publik.

3. Meningkatkan Alokasi Anggaran Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung kegiatannya serta melakukan efisiensi dalam pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

4. Mensinergikan kegiatan dokumentasi, sehingga dapat berjalan secara terpadu serta mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan

5. Sejalan dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan informasi Daerah melalui peningkatan kemampuan SDM, peningkatan sarana dan

prasarana pendukung.  
Tersedianya regulasi pedoman pelaksanaan (SOP) dan peningkatan koordinasi dengan PPID Pembantu dan Kabupaten / Kota.

### 3. Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian di lapangan, peneliti menyadari memiliki kekurangan dan kelemahan karena peneliti tergolong baru dan pemula dalam melakukan penelitian. Adapun keterbatasan penelitian yang peneliti alami sebagai berikut:

1. Keterbatasan literatur, dalam penulisan skripsi ini peneliti terkendala dengan buku-buku yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi serta masih kurang referensi berupa skripsi dan penelitian terdahulu sehingga menyulitkan peneliti dalam penulisan skripsi.
2. Sulitnya menentukan waktu yang tepat untuk mewawancarai informan yang jam kerjanya masih padat dan sering di lapangan sehingga sulit untuk ditemui.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, L.1975. *“Dasar-dasar kebijakan Publik”*. Bandung. Alfabeta
- \_\_\_\_\_.2008. *“Dasar-dasar kebijakan Publik”*. Bandung. Alfabeta
- \_\_\_\_\_.2012. *“Dasar-dasar kebijakan Publik”*. Bandung. Alfabeta
- \_\_\_\_\_.2014. *“Dasar-dasar kebijakan Publik”*. Bandung. Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinneka Cipta
- Cutlip, Scott. M., Center Allen H. & Broom.Glen. M. (2009), *Effective Public Relations*, Ed. 9. Jakarta : Kencana.
- Darmawan, Deni & Fauzi, Kunkun Nur. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya
- Moleong, J Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya
- Riswandi. 2009. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Subarsono, AG. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung. Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung. Alfabeta

- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Syafri, Wirman. 2012. *Study Tentang Administrasi Publik*. Jakarta. Erlangga
- Tugiman, Hiro. 1996. *Pengantar Audit Sistem Informasi*. Yogyakarta. Kanisius
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, Pt Bumi Askara, Jakarta.
- Wibawa, Samodra, 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Winarno. Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Cetakan Ke-1)*. Yogyakarta. PT Buku Seru.
- Skripsi**
- Dewita. 2019. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
- Miranda, Desti. 2019. *Kinerja Tim PPID Kabupaten Ketapang Dalam Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
- Sumber Internet**
- Cahyo Luktio. 2015. Bojonegoro. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik. Diakses dari [http://file:///C:/Users/User/Downloads/JURNAL%20\(cahyo%20lukito\)\\_%20\(1\).pdf](http://file:///C:/Users/User/Downloads/JURNAL%20(cahyo%20lukito)_%20(1).pdf). Pada tanggal 15 Februari 2020. Jam 20.59 WIB
- Darman. 2015. Teori-teori Manajemen dan Organisasi. Diakses dari <http://theorymanajemenandorganisasi.blogspot.com/2015/12/pelayanan-publik.html>. Pada tanggal 15 Februari 2020. Jam 20.15 WIB
- PEMROV KALBAR. 2017. LPPD HUMPRO 2017. 14 Februari.

<http://www.kalbarprov.go.id>.  
Kabupaten Pasuruan”. Diakses dari  
<http://repository.unair.ac.id/70861/>.  
Pada tanggal 12  
Maret 2020. Jam  
23.00 WIB  
Hkikmat, M. Mahi. 2014. Kajian  
Implementasi  
Keterbukaan  
Informasi Publik

Pada Badan  
Publik  
Kabupaten/Kota  
di Jawa Barat  
Tahun 2013.  
Diakses dari  
<http://digilib.uinsgd.ac.id/3672/>.  
Pada Tanggal 12  
Maret 2020. Jam  
23.12 WIB.

